



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR II TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan/perkembangan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik penambahan program dan kegiatan serta pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, sehingga timbul keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim pada tanggal 21 Juli 2014 Nomor 491/Bappeda-Renstra/2014 dan Nomor 02/DPRD/2014 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah ditetapkan dengan Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Bupati Muara Enim Nomor 03/DPRD/2014 dan Nomor 492/Bappeda-Renstra/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
26. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 213/KPTS/BPKAD/2014 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.1.881.095.071.286,73 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 43.612.595.007,24 sehingga menjadi Rp.1.924.707.666.293,97 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp.1.730.301.194.941,19
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 71.686.207.702,00
 - Jumlah Pendapatan Setelah perubahan Rp. 1.801.987.402.643,19
2. Belanja
 - a. Semula Rp.1.881.095.071.286,73
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 43.612.595.007,24
 - Jumlah Belanja Setelah perubahan Rp. 1.924.707.666.293,97
 - Surplus/Defisit Setelah perubahan Rp. (122.720.263.650,78)
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 294.990.906.345,54
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (78.123.993.510,66)
 - Jumlah Penerimaan Setelah perubahan Rp. 216.866.912.834,88

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	144.197.030.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(50.050.380.815,90)</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	<u>94.146.649.184,10</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	122.720.263.650,78
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	133.627.162.495,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.721.473.846,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	138.348.636.341,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	1.406.866.688.758,19
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>67.349.706.444,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	1.474.216.395.202,19

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	189.807.343.688,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(384.972.588,00)</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	189.422.371.100,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	34.349.325.099,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.339.904.098,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	40.689.229.197,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	13.305.941.078,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.208.438.700,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	10.097.502.378,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	13.616.042.440,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(7.076.419.920,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	6.539.622.520,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	72.355.853.878,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.666.428.368,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp.	81.022.282.246,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 753.698.210.758,19
 - 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 67.349.706.444,00
 - Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan Rp. 821.047.917.202,19
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp. 593.564.398.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 593.564.398.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp. 59.604.080.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. 59.604.080.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 0,00
 - Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. 0,00
 - b. Dana Darurat
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp. 58.046.943.100,00
 - 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 58.046.943.100,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 1) Semula Rp. 106.727.452.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 2.758.026.000,00
 - Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 109.485.478.000,00
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp. 25.032.948.588,00
 - 2) Bertambah/(berkurang)Rp. (3.142.998.588,00)
 - Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 21.889.950.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	735.245.954.434,54	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>45.344.829.035,24</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.		780.590.783.469,78

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	1.145.849.116.852,19	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.732.234.028,00)</u>	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.		1.144.116.882.824,19

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	605.710.088.898,80	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>38.524.909.130,98</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		644.234.998.029,78

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	1.591.952.327,74	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.558.047.672,26</u>	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.		4.150.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	2.799.555.460,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.048.020.120,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.		3.847.575.580,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	32.720.944.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.319.356.800,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.		35.040.301.300,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	5.620.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.		5.620.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan	Rp.		0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik

1) Semula	Rp.	76.803.413.248,00	
-----------	-----	-------------------	--

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 894.495.312,00
 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada
 Provinsi/kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
 dan Partai Politik Setelah Perubahan Rp. 77.697.908.560,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 10.000.000.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Belanja Tidak Terduga
 Setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 48.145.201.400,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (9.711.969.000,00)
 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 38.433.232.400,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 448.548.035.691,19
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.253.648.408,00)
 Jumlah Belanja Barang dan Jasa
 Setelah Perubahan Rp. 443.294.387.283,19

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 649.155.879.761,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.233.383.380,00
 Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 662.389.263.141,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 294.990.906.345,54
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (78.123.993.510,66)
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
 Setelah Perubahan Rp. 216.866.912.834,88

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 144.197.030.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (50.050.380.815,90)
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
 Setelah Perubahan Rp. 94.146.649.184,10

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula Rp. 177.469.692.288,28
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.043.006.489,34
 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan
 Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
 Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 196.512.698.777,62

b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan			
Setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah			
Setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	97.317.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(97.317.000.000,00)</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah			
Setelah Perubahan	Rp.		0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah			
Setelah Perubahan	Rp.		0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp.	20.204.214.057,26	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>150.000.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah			
Setelah Perubahan	Rp.		20.354.214.057,26
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	19.859.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan			
Setelah Perubahan	Rp.		34.859.500.000,00
b. Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	124.337.530.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(75.686.460.000,00)</u>	
Jumlah Penyertaan Modal / Investasi			
Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp.		48.651.070.000,00
c. Pembayaran Pokok Hutang			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Hutang			
Setelah Perubahan	Rp.		0,00

d. Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>10.636.079.184,10</u>
Jumlah Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga Setelah Perubahan		Rp. 10.636.079.184,10

e. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

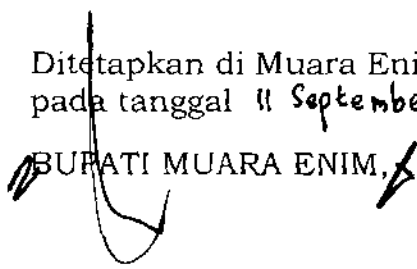
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

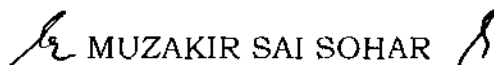
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 11 September 2014

BUPATI MUARA ENIM, 



MUZAKIR SAI SOHAR 

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 11 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,





TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : (9/ME/2014)



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.730.301.194.941,19	1.801.987.402.643,19	71.686.207.702,00	4,14
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	133.627.162.495,00	138.348.636.341,00	4.721.473.846,00	3,53
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	34.349.325.099,00	40.689.229.197,00	6.339.904.098,00	18,46
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.305.941.078,00	10.097.502.378,00	(3.208.438.700,00)	(24,11)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.616.042.440,00	6.539.622.520,00	(7.076.419.920,00)	(51,97)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	72.355.853.878,00	81.022.282.246,00	8.666.428.368,00	11,98
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.406.866.688.758,19	1.474.216.395.202,19	67.349.706.444,00	4,79
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	753.698.210.758,19	821.047.917.202,19	67.349.706.444,00	8,94
1.2.2	Dana Alokasi Umum	593.564.398.000,00	593.564.398.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	59.604.080.000,00	59.604.080.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	189.807.343.688,00	189.422.371.100,00	(384.972.588,00)	(0,20)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	58.046.943.100,00	58.046.943.100,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	106.727.452.000,00	109.485.478.000,00	2.758.026.000,00	2,58
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25.032.948.588,00	21.889.950.000,00	(3.142.998.588,00)	(12,56)
2	BELANJA	1.881.095.071.286,73	1.924.707.666.293,97	43.612.595.007,24	2,32
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	735.245.954.434,54	780.590.783.469,78	45.344.829.035,24	6,17
2.1.1	Belanja Pegawai	605.710.088.898,80	644.234.998.029,78	38.524.909.130,98	6,36
2.1.2	Belanja Bunga	1.591.952.327,74	4.150.000.000,00	2.558.047.672,26	160,69
2.1.3	Belanja Subsidi	2.799.555.460,00	3.847.575.580,00	1.048.020.120,00	37,44
2.1.4	Belanja Hibah	32.720.944.500,00	35.040.301.300,00	2.319.356.800,00	7,09
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.620.000.000,00	5.620.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	76.803.413.248,00	77.697.908.560,00	894.495.312,00	1,16
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.145.849.116.852,19	1.144.116.882.824,19	(1.732.234.028,00)	(0,15)
2.2.1	Belanja Pegawai	48.145.201.400,00	38.433.232.400,00	(9.711.969.000,00)	(20,17)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	448.548.035.691,19	443.294.387.283,19	(5.253.648.408,00)	(1,17)
2.2.3	Belanja Modal	649.155.879.761,00	662.389.263.141,00	13.233.383.380,00	2,04



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran II Peraturan Daerah Kab. Muara Enim
Nomor : 11 Tahun 2014
Tanggal : 11 September 2014

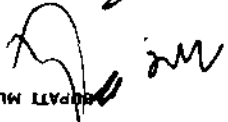
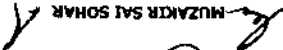
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN						BELAJA					
		SEBELUM			SETELAH			SEBELUM			SETELAH		
		PERUBAHAN	Rp	%	PERUBAHAN	Rp	%	PERUBAHAN	Rp	%	PERUBAHAN	Rp	%
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	372.988.657.198,70	174.749.919.600,00	547.738.576.798,70	410.041.585.074,50	172.044.373.600,00	582.085.958.674,50	34.347.381.875,80	6,27	14
1.01	Urusan Wajib Pendidikan	35.000.000,00	0,00	0,00	372.988.657.198,70	173.859.635.000,00	546.848.292.198,70	410.041.585.074,50	171.154.089.000,00	581.195.674.074,50	34.347.381.875,80	6,28	
1.17	Urusan Wajib Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	890.284.600,00	0,00	0,00	890.284.600,00	0,00	0,00		
1.02.01	Dinas Kesehatan	5.400.693.220,00	13.504.516.220,00	150,05	41.951.814.288,40	51.001.805.000,00	92.953.619.288,40	46.642.707.965,56	59.539.819.000,00	106.182.526.965,56	13.228.907.677,16	14,23	
1.02	Urusan Wajib Kesehatan	5.400.693.220,00	13.504.516.220,00	150,05	41.951.814.288,40	51.001.805.000,00	92.953.619.288,40	46.642.707.965,56	59.539.819.000,00	106.182.526.965,56	13.228.907.677,16	14,23	
1.02.02	RSUD DR. H.M. RAHAINI	30.175.853.878,00	33.756.724.000,00	11,87	23.499.218.296,70	62.749.070.377,00	86.248.288.673,70	26.267.264.590,76	66.129.940.499,00	92.597.205.089,76	6.348.916.416,06	7,36	
1.02	Urusan Wajib Kesehatan	30.175.853.878,00	33.756.724.000,00	11,87	23.499.218.296,70	62.749.070.377,00	86.248.288.673,70	26.267.264.590,76	66.129.940.499,00	92.597.205.089,76	6.348.916.416,06	7,36	
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan	85.583.408,00	89.814.908,00	4,94	1.076.988.149,46	317.640.344.500,00	370.717.332.649,46	3.251.726.194,24	319.140.344.500,00	372.352.070.694,24	1.674.738.044,78	0,52	
1.03	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	85.583.408,00	89.814.908,00	4,94	1.076.988.149,46	317.640.344.500,00	370.717.332.649,46	3.251.726.194,24	319.140.344.500,00	372.352.070.694,24	1.674.738.044,78	0,52	
1.03.02	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	166.425.000,00	172.500.000,00	3,65	4.606.159.676,74	126.588.717.000,00	131.194.876.676,74	4.668.902.545,59	126.194.867.000,00	130.863.769.545,59	(331.107.131,15)	(0,25)	
1.03	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	166.425.000,00	172.500.000,00	3,65	4.606.159.676,74	123.245.319.500,00	127.851.479.176,74	4.668.902.545,59	122.851.469.500,00	127.520.372.045,59	(331.107.131,15)	(0,26)	
1.04	Urusan Wajib Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343.397.500,00	0,00	0,00	3.343.397.500,00	0,00	0,00		
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	2.498.009.494,16	20.041.074.578,00	22.539.084.072,16	2.532.431.944,07	20.041.074.578,00	22.573.506.572,07	34.422.449,91	0,15	
1.05	Urusan Wajib Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.779.500,00	1.257.779.500,00	0,00	1.207.849.500,00	1.207.849.500,00	(49.930.000,00)	(3,97)	
1.06	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	2.498.009.494,16	18.783.295.078,00	21.281.304.572,16	2.532.431.944,07	18.833.225.078,00	21.365.657.022,07	84.352.449,91	0,40	
1.07.01	Dinas Perhubungan	999.353.000,00	1.525.690.000,00	52,67	2.662.291.809,00	3.855.600.000,00	6.517.891.809,00	2.764.807.225,27	3.855.600.000,00	6.620.407.225,27	102.515.416,27	1,57	
1.07	Urusan Wajib Perhubungan	999.353.000,00	1.525.690.000,00	52,67	2.662.291.809,00	3.855.600.000,00	6.517.891.809,00	2.764.807.225,27	3.855.600.000,00	6.620.407.225,27	102.515.416,27	1,57	
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	119.058.500,00	119.058.500,00	0,00	1.907.178.549,74	4.847.394.000,00	6.754.572.549,74	1.924.214.763,93	5.262.046.559,00	7.206.261.322,93	451.688.773,19	6,69	
1.08	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	119.058.500,00	119.058.500,00	0,00	1.907.178.549,74	4.847.394.000,00	6.754.572.549,74	1.924.214.763,93	5.262.046.559,00	7.206.261.322,93	451.688.773,19	6,69	
1.10.01	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	364.510.000,00	25.890.000,00	(338.620.000,00)	(92,90)	2.350.489.553,06	4.370.888.700,00	2.213.697.844,70	4.370.888.700,00	6.584.586.544,70	(116.791.508,36)	(1,74)	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN						BELAJA					
		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	BERUBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1.10	Usuran Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	364.510.000,00	25.890.000,00	(38.620.000,00) (92,90)	2.330.489.553,06	4.370.888.700,00	6.701.378.053,06	2.219.697.844,70	4.370.888.700,00	6.584.586.544,70	(116.791.598,36) (1,74)		
1.12.01	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	6.159.728.706,36	4.653.542.800,00	10.813.271.506,36	0,00	4.766.122.800,00	11.509.086.680,58	695.815.174,22	6,43	(54.070.000,00) (-4,26)
1.11	Usuran Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.036.400,00	1.269.036.400,00	0,00	1.214.966.400,00	1.214.966.400,00			
1.12	Usuran Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,00	0,00	0,00	6.159.728.706,36	4.653.542.800,00	10.813.271.506,36	0,00	4.766.122.800,00	11.509.086.680,58	695.815.174,22	6,43	(54.070.000,00) (-4,26)
1.13.01	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	1.604.950.584,34	8.619.800.000,00	10.224.750.584,34	1.558.603.386,23	10.289.464.500,00	11.848.067.886,23	1.623.317.301,89	15,88	1.623.317.301,89
1.13	Usuran Wajib Sosial	0,00	0,00	0,00	1.604.950.584,34	8.619.800.000,00	10.224.750.584,34	1.558.603.386,23	10.289.464.500,00	11.848.067.886,23	1.623.317.301,89	15,88	1.623.317.301,89
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	1.933.304.423,26	2.885.363.000,00	4.818.667.423,26	2.126.617.276,12	3.065.363.000,00	5.191.980.276,12	373.312.652,86	7,75	373.312.652,86
1.14	Usuran Wajib Ketrakerjaan	0,00	0,00	0,00	1.933.304.423,26	2.885.363.000,00	4.818.667.423,26	2.126.617.276,12	3.065.363.000,00	5.191.980.276,12	373.312.652,86	8,18	373.312.652,86
2.08	Usuran Pilihan Ketrasmigrasian	0,00	0,00	0,00	0,00	255.435.000,00	255.435.000,00	0,00	255.435.000,00	255.435.000,00	0,00	0,00	0,00
1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	1.548.517.686,66	7.781.802.500,00	9.330.320.186,66	1.574.146.762,01	7.781.802.500,00	9.355.949.262,01	25.629.075,35	0,27	25.629.075,35
1.15	Usuran Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	0,00	0,00	1.548.517.686,66	7.781.802.500,00	9.330.320.186,66	1.574.146.762,01	7.781.802.500,00	9.355.949.262,01	25.629.075,35	0,27	25.629.075,35
1.16.01	Badan Penanaman Modal dan Pertanahan Terpaku	4.627.126.750,00	100.000.000,00	2,21	1.811.082.558,94	5.101.354.500,00	6.912.437.058,94	1.566.475.170,47	5.240.702.500,00	6.810.177.670,47	(102.259.388,47) (1,48)		(102.259.388,47) (1,48)
1.16	Usuran Wajib Penanaman Modal	4.627.126.750,00	100.000.000,00	2,21	1.811.082.558,94	5.101.354.500,00	6.912.437.058,94	1.566.475.170,47	5.240.702.500,00	6.810.177.670,47	(102.259.388,47) (1,48)		(102.259.388,47) (1,48)
1.18.01	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	588.000.000,00	588.000.000,00	0,00	2.253.151.092,30	9.264.371.400,00	11.517.522.492,30	2.187.132.064,00	9.664.371.400,00	11.851.503.464,00	333.980.971,70	2,90	333.980.971,70
1.18	Usuran Wajib Kepemudaan dan Olah Raga	588.000.000,00	588.000.000,00	0,00	2.253.151.092,30	9.264.371.400,00	11.517.522.492,30	2.187.132.064,00	9.664.371.400,00	11.851.503.464,00	333.980.971,70	3,49	333.980.971,70
2.04	Usuran Pilihan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.793.300,00	1.937.793.300,00	0,00	1.937.793.300,00	1.937.793.300,00	0,00	0,00	0,00
1.19.01	Badan Kestatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	1.543.001.562,76	2.989.560.000,00	4.532.561.562,76	1.539.648.227,57	2.989.560.000,00	4.529.208.227,57	(3.353.335,19) (0,07)		(3.353.335,19) (0,07)
1.19	Usuran Wajib Kestatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	1.543.001.562,76	2.989.560.000,00	4.532.561.562,76	1.539.648.227,57	2.989.560.000,00	4.529.208.227,57	(3.353.335,19) (0,07)		(3.353.335,19) (0,07)
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.261.044.695,63	8.916.662.000,00	11.177.706.695,63	2.686.295.848,64	8.916.662.000,00	11.602.957.848,64	425.251.153,01	3,80	425.251.153,01
1.19	Usuran Wajib Kestatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	2.261.044.695,63	8.916.662.000,00	11.177.706.695,63	2.686.295.848,64	8.916.662.000,00	11.602.957.848,64	425.251.153,01	3,80	425.251.153,01
1.19.03	Badan Pengembangan Berencana Daerah	0,00	0,00	0,00	1.070.024.828,50	6.994.107.000,00	8.064.131.828,50	1.191.766.789,82	7.317.582.800,00	8.509.349.589,82	445.217.761,32	5,52	445.217.761,32
1.19	Usuran Wajib Kestatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	1.070.024.828,50	6.994.107.000,00	8.064.131.828,50	1.191.766.789,82	7.317.582.800,00	8.509.349.589,82	445.217.761,32	5,52	445.217.761,32
1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	11.028.236.400,00	0,00	11.028.236.400,00	11.028.236.400,00	0,00	11.028.236.400,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Usuran Wajib Ekonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi/Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kependudukan dan Persandian	0,00	0,00	0,00	11.028.236.400,00	0,00	11.028.236.400,00	11.028.236.400,00	0,00	11.028.236.400,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN										BELAJA										
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)								
					1	2	3	4	5 = 4 - 3	6					7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14									
%	Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%									
1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	712.930.676,22	0,00	712.930.676,22	0,00	712.930.676,22	716.989.689,73	0,00	716.989.689,73	4.059.013,51	0,57								
1.20	Urusan Wajib Ekonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Kepegawaian dan Persandian	0,00	0,00	0,00	712.930.676,22	0,00	712.930.676,22	0,00	712.930.676,22	716.989.689,73	0,00	716.989.689,73	4.059.013,51	0,57								
1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	9.805.547.924,52	0,00	9.805.547.924,52	0,00	9.805.547.924,52	10.144.067.036,64	0,00	10.144.067.036,64	809.471.019,88	1,52								
1.20	Urusan Wajib Ekonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Kepegawaian dan Persandian	0,00	0,00	0,00	9.805.547.924,52	0,00	9.805.547.924,52	0,00	9.805.547.924,52	10.144.067.036,64	0,00	10.144.067.036,64	809.471.019,88	1,52								
1.20.04	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	2.102.577.385,68	0,00	2.102.577.385,68	0,00	2.102.577.385,68	32.368.465.408,70	0,00	32.368.465.408,70	5.466.305.476,98	14,45								
1.20.04	Kepegawaian dan Persandian	0,00	0,00	0,00	2.102.577.385,68	0,00	2.102.577.385,68	0,00	2.102.577.385,68	32.368.465.408,70	0,00	32.368.465.408,70	5.466.305.476,98	14,45								
1.20.05	Inspektur Kabupaten	0,00	0,00	0,00	2.800.544.107,10	0,00	2.800.544.107,10	0,00	2.800.544.107,10	7.467.363.150,00	0,00	7.467.363.150,00	10.287.907.257,10	10,47								
1.20	Urusan Wajib Ekonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Kepegawaian dan Persandian	0,00	0,00	0,00	2.800.544.107,10	0,00	2.800.544.107,10	0,00	2.800.544.107,10	7.467.363.150,00	0,00	7.467.363.150,00	10.287.907.257,10	10,47								
1.20.06	Unitas Pendidikan Daerah	1.650.433.357.545,19	60.099.229.197,00	(1.590.334.128.348,19)	13.496.030.363,67	25.825.747.000,00	39.321.777.363,67	9.677.833.642,19	20.442.158.650,00	30.119.992.292,19	(9.201.785.071,48)	1.650.433.357.545,19	60.099.229.197,00	(1.590.334.128.348,19)	13.496.030.363,67	25.825.747.000,00	39.321.777.363,67	9.677.833.642,19	20.442.158.650,00	30.119.992.292,19	(9.201.785.071,48)	(23,40)
1.20	Urusan Wajib Ekonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Kepegawaian dan Persandian	1.650.433.357.545,19	60.099.229.197,00	(1.590.334.128.348,19)	13.496.030.363,67	25.825.747.000,00	39.321.777.363,67	9.677.833.642,19	20.442.158.650,00	30.119.992.292,19	(9.201.785.071,48)	1.650.433.357.545,19	60.099.229.197,00	(1.590.334.128.348,19)	13.496.030.363,67	25.825.747.000,00	39.321.777.363,67	9.677.833.642,19	20.442.158.650,00	30.119.992.292,19	(9.201.785.071,48)	(23,40)
1.20.07	Badan Kepegawaian Daerah	152.750.000,00	100.000.000,00	(52.750.000,00)	2.614.451.119,68	12.987.323.000,00	15.601.774.119,68	2.977.217.555,62	11.624.891.900,00	14.602.109.455,62	(999.664.664,06)	152.750.000,00	100.000.000,00	(52.750.000,00)	2.614.451.119,68	12.987.323.000,00	15.601.774.119,68	2.977.217.555,62	11.624.891.900,00	14.602.109.455,62	(999.664.664,06)	(6,41)
1.20	Urusan Wajib Ekonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Kepegawaian dan Persandian	152.750.000,00	100.000.000,00	(52.750.000,00)	2.614.451.119,68	12.987.323.000,00	15.601.774.119,68	2.977.217.555,62	11.624.891.900,00	14.602.109.455,62	(999.664.664,06)	152.750.000,00	100.000.000,00	(52.750.000,00)	2.614.451.119,68	12.987.323.000,00	15.601.774.119,68	2.977.217.555,62	11.624.891.900,00	14.602.109.455,62	(999.664.664,06)	(6,41)
1.20.09	Kecamatan Sempu Barat Ulu	0,00	0,00	0,00	823.215.286,42	1.691.297.000,00	2.514.512.286,42	1.691.297.000,00	2.514.512.286,42	1.696.797.000,00	2.584.512.662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.512.662,86	1.696.797.000,00	2.584.512.662,86	70.000.376,44	2,78	
1.20	Urusan Wajib Ekonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peringkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	0,00	0,00	0,00	823.215.286,42	1.691.297.000,00	2.514.512.286,42	1.691.297.000,00	2.514.512.286,42	1.696.797.000,00	2.584.512.662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.512.662,86	1.696.797.000,00	2.584.512.662,86	70.000.376,44	2,78	
1.20.10	Kecamatan Sempu Barat Tengah	0,00	0,00	0,00	939.243.858,78	1.778.357.000,00	2.717.600.858,78	1.039.314.424,57	1.796.357.000,00	2.825.671.424,57	108.070.565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825.671.424,57	1.796.357.000,00	2.825.671.424,57	108.070.565,79	3,98	
1.20	Urusan Wajib Ekonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peringkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	0,00	0,00	0,00	939.243.858,78	1.778.357.000,00	2.717.600.858,78	1.039.314.424,57	1.796.357.000,00	2.825.671.424,57	108.070.565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825.671.424,57	1.796.357.000,00	2.825.671.424,57	108.070.565,79	3,98	
1.20.11	Kecamatan Sempu Barat Laut	0,00	0,00	0,00	825.008.685,92	1.785.977.000,00	2.610.985.685,92	816.178.661,33	1.791.477.000,00	2.607.655.661,33	(3.330.024,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.655.661,33	1.791.477.000,00	2.607.655.661,33	(3.330.024,59)	(0,13)	
1.20	Urusan Wajib Ekonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peringkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	0,00	0,00	0,00	825.008.685,92	1.785.977.000,00	2.610.985.685,92	816.178.661,33	1.791.477.000,00	2.607.655.661,33	(3.330.024,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.655.661,33	1.791.477.000,00	2.607.655.661,33	(3.330.024,59)	(0,13)	
1.20.12	Kecamatan Tanjung Agung	0,00	0,00	0,00	1.417.084.837,78	2.195.817.500,00	3.612.902.337,78	1.430.969.764,16	2.195.817.500,00	3.626.787.264,16	13.884.926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626.787.264,16	2.195.817.500,00	3.626.787.264,16	13.884.926,38	0,38	
1.20	Urusan Wajib Ekonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peringkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	0,00	0,00	0,00	1.417.084.837,78	2.195.817.500,00	3.612.902.337,78	1.430.969.764,16	2.195.817.500,00	3.626.787.264,16	13.884.926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626.787.264,16	2.195.817.500,00	3.626.787.264,16	13.884.926,38	0,38	
1.20.13	Kecamatan Lawang Kidul	0,00	0,00	0,00	2.686.656.340,34	1.895.876.000,00	4.782.532.340,34	1.901.876.993,43	4.572.558.993,43	(209.973.346,91)	(4,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572.558.993,43	1.901.876.993,43	4.572.558.993,43	(209.973.346,91)	(4,39)	
1.20	Urusan Wajib Ekonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peringkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	0,00	0,00	0,00	2.686.656.340,34	1.895.876.000,00	4.782.532.340,34	1.901.876.993,43	4.572.558.993,43	(209.973.346,91)	(4,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572.558.993,43	1.901.876.993,43	4.572.558.993,43	(209.973.346,91)	(4,39)	
1.20.14	Kecamatan Muara Enim	0,00	0,00	0,00	4.017.866.646,06	2.200.678.000,00	6.218.544.646,06	4.629.191.683,81	2.210.678.000,00	6.839.869.683,81	621.325.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839.869.683,81	2.210.678.000,00	6.839.869.683,81	621.325.037,75	9,99	
1.20	Urusan Wajib Ekonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peringkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	0,00	0,00	0,00	4.017.866.646,06	2.200.678.000,00	6.218.544.646,06	4.629.191.683,81	2.210.678.000,00	6.839.869.683,81	621.325.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839.869.683,81	2.210.678.000,00	6.839.869.683,81	621.325.037,75	9,99	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN						SELISIR PERUBAHAN						BELAJA					
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAJ PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERTURANG	TDK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELAJA	TDK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELAJA	TDK LANGSUNG	LANGSUNG	SETELAJ PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERTURANG	TDK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELAJA	TDK LANGSUNG	LANGSUNG
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14	%					
1.20.31	Sekretariat KOPREP Kabupaten Muara Enim	0,00	0,00	0,00	0,00	396.962.711,80	486.387.700,00	883.350.411,80	388.604.747,21	455.707.700,00	844.312.447,21	(39.037.964,59)	(4,42)						
1.20.32	Kecamatan Belimbir	0,00	0,00	0,00	0,00	750.163.547,82	1.607.889.000,00	2.357.552.547,82	985.296.337,55	1.613.889.000,00	2.599.185.337,55	241.632.789,73	10,25						
1.20	Urusan Wajib Ekonom Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peringkat Daerah, Kecamatan dan Persand	0,00	0,00	0,00	0,00	750.163.547,82	1.607.889.000,00	2.357.552.547,82	985.296.337,55	1.613.889.000,00	2.599.185.337,55	241.632.789,73	10,25						
1.20.33	Kecamatan Belida Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	720.229.250,92	1.594.561.000,00	2.314.790.250,92	801.415.444,02	1.534.046.000,00	2.335.461.444,02	20.671.193,10	0,89						
1.20	Urusan Wajib Ekonom Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peringkat Daerah, Kecamatan dan Persand	0,00	0,00	0,00	0,00	720.229.250,92	1.594.561.000,00	2.314.790.250,92	801.415.444,02	1.534.046.000,00	2.335.461.444,02	20.671.193,10	0,89						
1.20.34	Kecamatan Lubal Ulu	0,00	0,00	0,00	0,00	472.853.743,32	1.776.364.000,00	2.249.217.743,32	640.931.778,31	1.783.364.000,00	2.424.297.778,31	175.080.034,99	7,78						
1.20	Urusan Wajib Ekonom Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peringkat Daerah, Kecamatan dan Persand	0,00	0,00	0,00	0,00	472.853.743,32	1.776.364.000,00	2.249.217.743,32	640.931.778,31	1.783.364.000,00	2.424.297.778,31	175.080.034,99	7,78						
1.20.35	Badan Pengkaban Keuangan dan Aset Daerah	36.071.042.440,00	1.686.094.921.068,19	1.650.023.878.628,19	####	163.326.840.085,24	21.701.490.078,00	185.028.330.163,24	158.259.486.851,97	19.988.572.351,00	178.248.059.202,97	(6.780.270.960,27)	(3,66)						
1.20	Urusan Wajib Ekonom Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peringkat Daerah, Kecamatan dan Persand	36.071.042.440,00	1.686.094.921.068,19	1.650.023.878.628,19	####	163.326.840.085,24	21.701.490.078,00	185.028.330.163,24	158.259.486.851,97	19.988.572.351,00	178.248.059.202,97	(6.780.270.960,27)	(3,66)						
1.21.01	Kantor Kecamatan Pangau	0,00	0,00	0,00	0,00	941.335.025,86	3.942.765.100,00	4.884.100.125,86	951.298.838,08	3.942.765.100,00	4.894.063.938,08	9.963.812,22	0,20						
1.21	Urusan Wajib Kecamatan Pangau	0,00	0,00	0,00	0,00	941.335.025,86	3.942.765.100,00	4.884.100.125,86	951.298.838,08	3.942.765.100,00	4.894.063.938,08	9.963.812,22	0,20						
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.644.853,84	23.209.241.500,00	25.160.886.353,84	2.174.649.089,95	24.426.241.500,00	26.600.890.589,95	1.440.004.236,11	5,72						
1.22	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.644.853,84	23.209.241.500,00	25.160.886.353,84	2.174.649.089,95	24.426.241.500,00	26.600.890.589,95	1.440.004.236,11	5,72						
1.25.01	Kantor Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	620.588.116,20	7.917.419.500,00	8.538.007.616,20	952.312.505,04	8.217.419.500,00	9.169.752.005,04	631.744.388,84	7,40						
1.25	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	620.588.116,20	7.917.419.500,00	8.538.007.616,20	952.312.505,04	8.217.419.500,00	9.169.752.005,04	631.744.388,84	7,40						
1.26.01	Kantor Perpustakaan, Arkip Daerah dan Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	887.113.941,56	1.723.215.000,00	2.610.328.941,56	1.146.783.062,49	1.723.215.000,00	2.869.998.062,49	289.669.120,93	9,95						
1.26	Urusan Wajib Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	887.113.941,56	1.723.215.000,00	2.610.328.941,56	1.146.783.062,49	1.723.215.000,00	2.869.998.062,49	289.669.120,93	9,95						
1.29	Urusan Wajib Keasipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.900.000,00	156.900.000,00	0,00	156.900.000,00	156.900.000,00	0,00	0,00						
1.29	Urusan Wajib Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	887.113.941,56	1.566.315.000,00	2.453.428.941,56	1.146.783.062,49	1.566.315.000,00	2.713.098.062,49	259.669.120,93	10,58						
2.01.01	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.821.958,30	21.894.835.000,00	24.913.656.958,30	3.014.312.798,82	21.894.835.000,00	24.909.147.798,82	(4.509.159,48)	(0,02)						
2.01	Urusan Filikan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.821.958,30	21.894.835.000,00	24.913.656.958,30	3.014.312.798,82	21.894.835.000,00	24.909.147.798,82	(4.509.159,48)	(0,02)						
2.01.02	Dinas Perkebunan	24.000.000,00	124.000.000,00	100.000.000,00	416,67	3.532.103.555,98	14.449.314.350,00	17.981.417.905,98	3.334.878.507,75	13.503.005.450,00	16.837.883.957,75	(1.143.533.948,23)	(6,36)						
2.01	Urusan Filikan Pertanian	24.000.000,00	124.000.000,00	100.000.000,00	416,67	3.532.103.555,98	14.449.314.350,00	17.981.417.905,98	3.334.878.507,75	13.503.005.450,00	16.837.883.957,75	(1.143.533.948,23)	(6,36)						
2.01	Urusan Filikan Pertanian	24.000.000,00	124.000.000,00	100.000.000,00	416,67	3.532.103.555,98	14.449.314.350,00	17.981.417.905,98	3.334.878.507,75	13.503.005.450,00	16.837.883.957,75	(1.143.533.948,23)	(6,36)						

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN					SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	TDK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANGA	TDK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANGA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	TDK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANGA		
2.01.03	Dinas Peternakan dan Perikanan	138.060.000,00	138.000.000,00	(2.060.000,00)	(1,49)	2.729.921.477,72	12.642.101.500,00	15.372.022.977,72	2.747.550.044,45	12.642.101.500,00	15.389.651.544,45	17.628.566,73	0,11			13 = 12 - 9	14	%
2.01	Urusan Pilihan Pertanian	138.060.000,00	138.000.000,00	(2.060.000,00)	(1,49)	2.729.921.477,72	8.661.547.000,00	11.391.468.477,72	2.747.550.044,45	8.521.427.000,00	11.268.977.044,45	(122.491.433,27)	(1,08)					
2.05	Urusan Pilihan Kekutan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980.554.500,00	3.980.554.500,00	0,00	4.120.674.500,00	4.120.674.500,00	140.120.000,00	3,52					
2.01.04	Badan Peternakan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Ketutaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049.374.266,84	11.410.112.000,00	18.459.486.266,84	12.864.589.265,47	11.395.485.500,00	24.260.074.765,47	5.800.588.498,63	31,42					
2.01	Urusan Pilihan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049.374.266,84	11.410.112.000,00	18.459.486.266,84	12.864.589.265,47	11.395.485.500,00	24.260.074.765,47	5.800.588.498,63	31,42					
2.02.01	Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942.212.660,04	4.534.397.800,00	7.476.610.460,04	2.992.646.852,95	4.575.197.800,00	7.567.844.652,95	91.234.192,91	1,22					
2.02	Urusan Pilihan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942.212.660,04	4.534.397.800,00	7.476.610.460,04	2.992.646.852,95	4.575.197.800,00	7.567.844.652,95	91.234.192,91	1,22					
2.03.01	Dinas Pertambangan dan Energi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.806.152,00	18.150.469.052,00	2.197.924.126,72	2.197.924.126,72	18.856.662.900,00	18.856.587.026,72	706.117.974,72	3,89					
2.03	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.806.152,00	18.150.469.052,00	2.197.924.126,72	2.197.924.126,72	18.856.662.900,00	18.856.587.026,72	706.117.974,72	3,89					
2.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.020.381.200,00	988.932.000,00	(31.449.200,00)	(3,08)	3.175.856.957,64	19.464.743.419,19	22.640.600.376,83	3.226.729.844,60	19.524.743.419,19	22.751.473.263,79	110.872.886,96	0,49					
2.06	Urusan Pilihan Perdagangan	1.020.381.200,00	988.932.000,00	(31.449.200,00)	(3,08)	3.175.856.957,64	18.263.240.419,19	21.439.097.376,83	3.226.729.844,60	18.348.240.419,19	21.574.970.263,79	135.872.886,96	0,63					
2.07	Urusan Pilihan Industri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.503.000,00	1.201.503.000,00	0,00	1.176.503.000,00	1.176.503.000,00	(25.000.000,00)	(2,08)					
JUMLAH		1.730.301.194.941,19	1.801.987.402.643,19	71.686.207.702,00	4,14	735.245.954.434,54	1.145.849.116.852,19	1.881.095.071.286,73	780.590.783.469,78	1.144.116.882.824,19	1.924.707.656.293,97	43.612.595.007,24	2,32					


 BUPATI MUARA ENIM

 MUZAKIR SAI SOHAR

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(150.793.876.345,54)	(122.720.263.650,78)	28.073.612.694,76	(18,62)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	294.990.906.345,54	216.866.912.834,88	(78.123.993.510,66)	(26,48)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	177.469.692.288,28	196.512.698.777,62	19.043.006.489,34	10,73
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	97.317.000.000,00	0,00	(97.317.000.000,00)	(100,00)
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	20.204.214.057,26	20.354.214.057,26	150.000.000,00	0,74
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	144.197.030.000,00	94.146.649.184,10	(50.050.380.815,90)	(34,71)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	19.859.500.000,00	34.859.500.000,00	15.000.000.000,00	75,53
3.2.2	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	124.337.530.000,00	48.651.070.000,00	(75.686.460.000,00)	(60,87)
3.2.5	Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga	0,00	10.636.079.184,10	10.636.079.184,10	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	150.793.876.345,54	122.720.263.650,78	(28.073.612.694,76)	(18,62)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

me. BUPATI MUARA ENIM

h. MUZAKIR SAI SOHAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 05	Pembangunan Pasar Terpadu	9.344.797.000,00	6.741.163.000,00	(2.603.634.000,00)	(27,86)	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	23.712.000,00	23.712.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.344.797.000,00	6.711.001.000,00	(2.633.796.000,00)	(28,18)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.620.219.176,83)	(21.762.541.263,79)	(142.322.086,96)	0,66	

 **BUPATI MUARA ENIM** 

 **MUZAKIR SAI SOHAR** 

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN										SETELAH PERUBAHAN									
		JENIS BELANJA					JENIS BELANJA					JENIS BELANJA					JENIS BELANJA				
		JUMLAH					JUMLAH					JUMLAH					JUMLAH				
		BARANG & JASA	MODAL	5	6 = 3 + 4 + 5	7	BARANG & JASA	MODAL	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	BARANG & JASA	MODAL	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	BARANG & JASA	MODAL	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6
2.06.2.06.01.15.02	Facilities penyediaan pemasaran-pemasalahan pedagang konsumen	10.410.000,00	0,00	0,00	10.410.000,00	10.410.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	8.640.000,00	0,00	100.671.000,00	0,00	0,00	100.671.000,00	0,00	53.562.000,00	0,00	0,00	53.562.000,00	0,00
2.06.2.06.01.15.03	Peningkatan pengawasan pedagang barang dan jasa	8.640.000,00	0,00	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	53.562.000,00	0,00	0,00	53.562.000,00	0,00	100.671.000,00	0,00	0,00	100.671.000,00	0,00	53.562.000,00	0,00	0,00	53.562.000,00	0,00
2.06.2.06.01.15.05	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai/pembebasan barang kena cukai ilegal	8.640.000,00	0,00	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	53.562.000,00	0,00	0,00	53.562.000,00	0,00	100.671.000,00	0,00	0,00	100.671.000,00	0,00	53.562.000,00	0,00	0,00	53.562.000,00	0,00
2.06.2.06.01.15.07	Pengawasan dan pengembangan alat ukur, timbangan dan	4.170.000,00	0,00	0,00	4.170.000,00	4.170.000,00	59.446.000,00	0,00	0,00	59.446.000,00	0,00	88.088.000,00	0,00	0,00	88.088.000,00	0,00	59.446.000,00	0,00	0,00	59.446.000,00	0,00
2.06.2.06.01.15.08	Facilities penyelesaian sengketa konsumen/pelaksanaan tugas Badan	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	88.088.000,00	0,00	0,00	88.088.000,00	0,00	100.671.000,00	0,00	0,00	100.671.000,00	0,00	53.562.000,00	0,00	0,00	53.562.000,00	0,00
2.06.2.06.01.17	Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	88.088.000,00	0,00	0,00	88.088.000,00	0,00	100.671.000,00	0,00	0,00	100.671.000,00	0,00	53.562.000,00	0,00	0,00	53.562.000,00	0,00
2.06.2.06.01.17.02	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	9.990.000,00	0,00	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00	51.331.000,00	0,00	0,00	51.331.000,00	0,00	100.671.000,00	0,00	0,00	100.671.000,00	0,00	53.562.000,00	0,00	0,00	53.562.000,00	0,00
2.06.2.06.01.18	Pengembangan informasi pedang pasar perdagangan luar negeri	9.990.000,00	0,00	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00	51.331.000,00	0,00	0,00	51.331.000,00	0,00	100.671.000,00	0,00	0,00	100.671.000,00	0,00	53.562.000,00	0,00	0,00	53.562.000,00	0,00
2.06.2.06.01.18.03	Program Peningkatan Efektivitas Perdagangan Dalam Negeri	53.439.000,00	0,00	0,00	53.439.000,00	53.439.000,00	368.513.000,00	0,00	0,00	368.513.000,00	0,00	100.671.000,00	0,00	0,00	100.671.000,00	0,00	53.562.000,00	0,00	0,00	53.562.000,00	0,00
2.06.2.06.01.18.08	Facilities Pasar Muatan	19.290.000,00	0,00	0,00	19.290.000,00	19.290.000,00	36.713.000,00	0,00	0,00	36.713.000,00	0,00	100.671.000,00	0,00	0,00	100.671.000,00	0,00	53.562.000,00	0,00	0,00	53.562.000,00	0,00
2.06.2.06.01.18.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Harga dan Distribusi Barang	12.383.000,00	0,00	0,00	12.383.000,00	12.383.000,00	94.119.000,00	0,00	0,00	94.119.000,00	0,00	100.671.000,00	0,00	0,00	100.671.000,00	0,00	53.562.000,00	0,00	0,00	53.562.000,00	0,00
2.06.2.06.01.18.10	Facilities Pasar Rakyat	8.466.000,00	0,00	0,00	8.466.000,00	8.466.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00	0,00	100.671.000,00	0,00	0,00	100.671.000,00	0,00	53.562.000,00	0,00	0,00	53.562.000,00	0,00
2.06.2.06.01.20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344.797.000,00	0,00	0,00	9.344.797.000,00	0,00	100.671.000,00	0,00	0,00	100.671.000,00	0,00	53.562.000,00	0,00	0,00	53.562.000,00	0,00
2.06.2.06.01.20.02	Perbaikan Pasar Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344.797.000,00	0,00	0,00	9.344.797.000,00	0,00	100.671.000,00	0,00	0,00	100.671.000,00	0,00	53.562.000,00	0,00	0,00	53.562.000,00	0,00
2.06.2.06.01.20.03	Rehab Berat / Sedang Pasar Perdesaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344.797.000,00	0,00	0,00	9.344.797.000,00	0,00	100.671.000,00	0,00	0,00	100.671.000,00	0,00	53.562.000,00	0,00	0,00	53.562.000,00	0,00
2.06.2.06.01.20.05	Perbaikan Pasar Terpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344.797.000,00	0,00	0,00	9.344.797.000,00	0,00	100.671.000,00	0,00	0,00	100.671.000,00	0,00	53.562.000,00	0,00	0,00	53.562.000,00	0,00
2.07.2.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.495.000,00	1.014.008.000,00	1.014.008.000,00	1.201.503.000,00	27.495.000,00	1.149.008.000,00	1.149.008.000,00	0,00	1.176.503.000,00	(25.000.000,00)	27.495.000,00	1.014.008.000,00	1.014.008.000,00	1.176.503.000,00	(25.000.000,00)	27.495.000,00	1.014.008.000,00	1.014.008.000,00	1.176.503.000,00	(25.000.000,00)
2.07.2.06.01.15	Program peningkatan Kapasitas Tipek Sistem Produksi	7.275.000,00	232.172.000,00	232.172.000,00	239.447.000,00	7.275.000,00	232.172.000,00	232.172.000,00	0,00	239.447.000,00	0,00	232.172.000,00	232.172.000,00	232.172.000,00	239.447.000,00	0,00	232.172.000,00	232.172.000,00	232.172.000,00	239.447.000,00	0,00
2.07.2.06.01.15.05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	4.095.000,00	117.976.000,00	117.976.000,00	122.071.000,00	4.095.000,00	117.976.000,00	117.976.000,00	0,00	122.071.000,00	0,00	232.172.000,00	117.976.000,00	117.976.000,00	239.447.000,00	0,00	232.172.000,00	117.976.000,00	117.976.000,00	239.447.000,00	0,00
2.07.2.06.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3.510.000,00	293.684.000,00	293.684.000,00	297.194.000,00	3.510.000,00	268.684.000,00	268.684.000,00	0,00	272.194.000,00	(25.000.000,00)	272.194.000,00	268.684.000,00	268.684.000,00	272.194.000,00	(25.000.000,00)	272.194.000,00	268.684.000,00	268.684.000,00	272.194.000,00	(25.000.000,00)
2.07.2.06.01.18	Program Peningkatan Struktur Industri	5.130.000,00	14.214.000,00	14.214.000,00	179.344.000,00	5.130.000,00	179.344.000,00	179.344.000,00	0,00	179.344.000,00	0,00	179.344.000,00	179.344.000,00	179.344.000,00	179.344.000,00	0,00	179.344.000,00	179.344.000,00	179.344.000,00	179.344.000,00	0,00
2.07.2.06.01.18.03	Pembinaan keterampilan produksi industri hulu hingga ke hilir	5.130.000,00	14.214.000,00	14.214.000,00	179.344.000,00	5.130.000,00	179.344.000,00	179.344.000,00	0,00	179.344.000,00	0,00	179.344.000,00	179.344.000,00	179.344.000,00	179.344.000,00	0,00	179.344.000,00	179.344.000,00	179.344.000,00	179.344.000,00	0,00
2.07.2.06.01.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	11.580.000,00	473.938.000,00	473.938.000,00	485.518.000,00	11.580.000,00	473.938.000,00	473.938.000,00	0,00	485.518.000,00	0,00	485.518.000,00	473.938.000,00	473.938.000,00	485.518.000,00	0,00	485.518.000,00	473.938.000,00	473.938.000,00	485.518.000,00	0,00
2.07.2.06.01.19.02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	6.080.000,00	350.900.000,00	350.900.000,00	356.980.000,00	6.080.000,00	350.900.000,00	350.900.000,00	0,00	356.980.000,00	0,00	356.980.000,00	350.900.000,00	350.900.000,00	356.980.000,00	0,00	356.980.000,00	350.900.000,00	350.900.000,00	356.980.000,00	0,00
2.07.2.06.01.19.03	Facilities peningkatan kapasitas sentra-sentra industri	5.500.000,00	123.038.000,00	123.038.000,00	128.538.000,00	5.500.000,00	123.038.000,00	123.038.000,00	0,00	128.538.000,00	0,00	128.538.000,00	123.038.000,00	123.038.000,00	128.538.000,00	0,00	128.538.000,00	123.038.000,00	123.038.000,00	128.538.000,00	0,00
JUMLAH		220.136.000,00	3.618.490.419,19	3.618.490.419,19	15.628.117.000,00	19.464.743.419,19	221.951.000,00	3.855.170.419,19	15.447.622.000,00	19.524.743.419,19	60.000.000,00	220.136.000,00	3.618.490.419,19	3.618.490.419,19	19.524.743.419,19	60.000.000,00	220.136.000,00	3.618.490.419,19	3.618.490.419,19	19.524.743.419,19	60.000.000,00

MUZAKIR SAI SOHAR

BUPATI MUARA ENIM



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2014

KODE			URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						JUMLAH (Rp)	%
1			2	3	4	5= 4 - 3	6
01			PELAYANAN UMUM	444.857.670.130,21	421.763.067.825,51	(23.094.602.304,70)	(5,19)
01	1	06	Perencanaan Pembangunan	21.281.304.572,16	21.365.657.022,07	84.352.449,91	0,40
01	1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	414.881.457.941,85	391.070.758.798,40	(23.810.699.143,45)	(5,74)
01	1	24	Kearsipan	156.900.000,00	156.900.000,00	0,00	0,00
01	1	25	Komunikasi dan Informatika	8.538.007.616,20	9.169.752.005,04	631.744.388,84	7,40
03			KETERTIBAN DAN KEAMANAN	23.774.400.086,89	24.641.515.666,03	867.115.579,14	3,65
03	1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	23.774.400.086,89	24.641.515.666,03	867.115.579,14	3,65
04			EKONOMI	182.618.566.955,27	190.046.131.971,85	7.427.565.016,58	4,07
04	1	07	Perhubungan	6.517.891.809,00	6.620.407.225,27	102.515.416,27	1,57
04	1	14	Ketenagakerjaan	4.563.232.423,26	4.936.545.276,12	373.312.852,86	8,18
04	1	15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9.330.320.186,66	9.355.949.262,01	25.629.075,35	0,27
04	1	16	Penanaman Modal	6.912.437.058,94	6.810.177.670,47	(102.259.388,47)	(1,48)
04	1	21	Ketahanan Pangan	4.884.100.125,86	4.894.063.938,08	9.963.812,22	0,20
04	1	22	Pemberdayaan Masyarakat Desa	25.160.886.353,84	26.600.890.589,95	1.440.004.236,11	5,72
04	2	01	Pertanian	72.746.029.608,84	77.276.083.566,49	4.530.053.957,65	6,23
04	2	02	Kehutanan	7.476.610.460,04	7.567.844.652,95	91.234.192,91	1,22
04	2	03	Energi dan Sumberdaya Mineral	18.150.469.052,00	18.856.587.026,72	706.117.974,72	3,89
04	2	05	Kelautan dan Perikanan	3.980.554.500,00	4.120.674.500,00	140.120.000,00	3,52
04	2	06	Perdagangan	21.439.097.376,83	21.574.970.263,79	135.872.886,96	0,63
04	2	07	Industri	1.201.503.000,00	1.176.503.000,00	(25.000.000,00)	(2,08)
04	2	08	Ketransmigrasian	255.435.000,00	255.435.000,00	0,00	0,00
05			LINGKUNGAN HIDUP	8.012.352.049,74	8.414.110.822,93	401.758.773,19	5,01
05	1	05	Penataan Ruang	1.257.779.500,00	1.207.849.500,00	(49.930.000,00)	(3,97)
05	1	08	Lingkungan Hidup	6.754.572.549,74	7.206.261.322,93	451.688.773,19	6,69
06			PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	451.912.209.326,20	453.255.840.239,83	1.343.630.913,63	0,30
06	1	03	Pekerjaan Umum	448.568.811.826,20	449.912.442.739,83	1.343.630.913,63	0,30

KODE			URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						JUMLAH (Rp)	%
1			2	3	4	5 = 4 - 3	6
06	1	04	Perumahan	3.343.397.500,00	3.343.397.500,00	0,00	0,00
07			KESEHATAN	190.015.179.468,46	210.288.818.735,90	20.273.639.267,44	10,67
07	1	02	Kesehatan	179.201.907.962,10	198.779.732.055,32	19.577.824.093,22	10,93
07	1	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	10.813.271.506,36	11.509.086.680,58	695.815.174,22	6,43
08			PARIWISATA DAN BUDAYA	2.828.077.900,00	2.828.077.900,00	0,00	0,00
08	1	17	Kebudayaan	890.284.600,00	890.284.600,00	0,00	0,00
08	2	04	Pariwisata	1.937.793.300,00	1.937.793.300,00	0,00	0,00
10			PENDIDIKAN	558.881.450.332,56	593.822.482.300,99	34.941.031.968,43	6,25
10	1	01	Pendidikan	546.848.292.198,70	581.195.674.074,50	34.347.381.875,80	6,28
10	1	18	Kepemudaan dan Olah Raga	9.579.729.192,30	9.913.710.164,00	333.980.971,70	3,49
10	1	26	Perpustakaan	2.453.428.941,56	2.713.098.062,49	259.669.120,93	10,58
11			PERLINDUNGAN SOSIAL	18.195.165.037,40	19.647.620.830,93	1.452.455.793,53	7,98
11	1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil	6.701.378.053,06	6.584.586.544,70	(116.791.508,36)	(1,74)
11	1	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.269.036.400,00	1.214.966.400,00	(54.070.000,00)	(4,26)
11	1	13	Sosial	10.224.750.584,34	11.848.067.886,23	1.623.317.301,89	15,88
				1.881.095.071.286,73	1.924.707.666.293,97	43.612.595.007,24	2,32


 BUPATI MUARA ENIM

 MUZAKIR SAI SOHAR

KABUPATEN MUARA ENIM
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PERJABATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

GOLONGAN / RUANG	ESSELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Golongan IV /e								0
Golongan IV /d		1						1
Golongan IV /c		24				2	2	28
Golongan IV /b		8	29	1		9	4	51
Golongan IV /a			88	34		2.095	8	2225
JUMLAH GOLONGAN IV	-	33	117	35	-	2.106	14	2.305
Golongan III/d			45	269		729	19	1.062
Golongan III/c			11	244		465	49	769
Golongan III/b				174		683	335	1.192
Golongan III/a				33		663	315	1.011
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	56	720	-	2.540	718	4.034
Golongan II/d						355	101	456
Golongan II/c						352	159	511
Golongan II/b						401	309	710
Golongan II/a						52	228	280
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	1.160	797	1.957
Golongan I/d							10	10
Golongan I/c							42	42
Golongan I/b							6	6
Golongan I/a							36	36
JUMLAH GOLONGAN I							94	94
TOTAL		33	173	755		5.806	1.623	8.390

me **BUPATI MUARA ENIM**
MUZAKIR SAI SOHAR

KABUPATEN MUARA ENIM

**DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir T.A. 2013 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) T.A 2014	
			APBD INDUK T.A. 2013	PERUBAHAN APBD T.A. 2013		APBD	PERUBAHAN APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
				NIHIL			
Jumlah			-	-	-	-	-

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KAB. MUARA ENIM

NOMOR : 11 TAHUN 2014

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2014

KABUPATEN MUARA ENIM
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

No	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun ini (Rp)		Jumlah sisa Pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bank Dunia / IBRD / UWSSP (Penerusan Pinjaman)	NPPLN No. SLA - 1225/ DSMI/2009 02 November 2009	2 November 2009	97.317.000.000	24,5 Thn	NPPLN LIBOR + Variable Spread + 5,02%	Untuk Peningkatan Sistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Muara Enim	-	1.591.952.327,74	97.317.000.000,00	1.591.952.327,74
Jumlah				97.317.000.000	-	-	-	-	1.591.952.327,74	97.317.000.000,00	1.591.952.327,74

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR